

RENSTRA

2025 - 2029



**RENCANA
STRATEGIS
2025 - 2029**



**PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PERIKANAN**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sampai selesainya penyusunan “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029”.

Dasar acuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara operasional di jabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi yang disajikan meliputi gambaran pelayanan; isu-isu strategis; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bisa menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Nunukan serta melangkah bersama dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disampaikan terima kasih.



Akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Perikanan senantiasa memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan diterima sebagai amal ibadah, Amin.

Nunukan, 20 September 2025



**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NUNUKAN,**

SUHADI, S. Hut, M.Sc

Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19681105 199403 1 007



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATRGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .	32
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian	
Pelayanan	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.2.1 Isu Strategis	47
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, ARAH	
KEBIJAKAN DAN POHON KINERJA	51
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029..	51
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Visi Misi	
Kabupaten Nunukan.....	51
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	53
3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	59
3.5 Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	60
 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG PERIKANAN.....	61
4.1 Program,Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra	
Perangkat Daerah.....	61
4.2 Rumusan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan Renstra	
Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	63



4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	77
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
4.5	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	96
4.5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	97
4.5.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	98
BAB V.	PENUTUP	100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Kaidah Pelaksanaan	100
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	102



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	20
Gambar 3.1 Cascading Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	52
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .	60
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.....	61



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	22
Tabel 2.2	Aset /Modal Yang Tersedia	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perikanan Tahun 2021 - 2024	27
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	31
Tabel 2.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – Hingga Akhir Tahun 2024.....	35
Tabel 2.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD	36
Tabel 2.7	Hasil Telaah Struktur dan Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan	42
Tabel 2.8	Rumusan Isu Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029	48
Tabel 3.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja	53
Tabel 3.2	Sasaran dan Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029	55
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 – 2029.....	58
Tabel 3.5	Matriks Penahapan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2026 – 2030.....	59
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	62
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Rencana Akhir Renstra Dinas Perikanan	64
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan	97
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing - masing, menyusun RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah Kabupaten Nunukan dengan semangat pembangunan daerah didalamnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Nunukan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan memerlukan suatu perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan yang jelas.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten



Nunukan untuk periode 5 (*lima*) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 serta dengan melihat keterkaitan pencapaian sasaran strategis nasional maupun provinsi khususnya di bidang perikanan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui proses yang transparan demokratis dan partisipatif.

Renstra Dinas Perikanan disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan acuan bagi rencana kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra tingkat Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pedoman umum yang kemudian di jabarkan dalam Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsim Kalimantan Utara, dan selanjutnya di implementasikan serta di sesuaikan dengan kondisi lokal melalui Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersifat skala besar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengadaptasi arah kebijakan tersebut berdasarkan wilayahnya dan selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan melaksanakan program spesifik sesuai dengan kewenangan daerah dan Target KKP serta DKP Provinsi.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain:

- Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sitem Perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025;



- Keputusan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 seri A Nomor 04);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);



- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan prangkat daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 55);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 55);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten



Nunukan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Perikanan Kabupaten Nunukan secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah :

- Menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 serta kebijakan lainnya dengan merumuskan tujuan, sasaran serta program pembangunan Perikanan Kabupaten Nunukan yang ingin dicapai pada periode 2025 – 2029;
- Menyajikan gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan; Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan; Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan; serta Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;
- Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Bidang Perikanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan Perikanan Kabupaten Nunukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Landasan Hukum yang memuat peraturan perundangan



dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, Maksud dan Tujuan yang memberikan uraian ringkas tentang penyusunan renstra, dan Sistematika Penulisan yang menguraikan organisasi penyusunan dokumen Renstra terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. Penjabaran dalam Bab ini mencakup :

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematikan penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Selain itu juga, menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembanga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis yang mencakup antara lain:

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan



2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara beserta indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang. Dalam bab ini disajikan matriks yang menunjukkan konsistensi dan relevansi antara pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah;

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah;

3.3. Strategi Perangkat Daerah; dan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Mengemukakan mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan serta menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; dan
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Kinerja Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Merupakan bagian pengesahan dan penegasan mengenai pentingnya penyusunan renstra perangkat daerah untuk peningkatan kinerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, pada penutup juga ditegaskan mengenai penggunaan dokumen renstra sebagai pedoman penyusunan renja perangkat daerah dan rencana kegiatan anggaran (RKA) serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3. Pengendalian dan Evaluasi



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2021.

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan memiliki tugas : “ Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perikanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan ditunjang dengan Susunan Organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
- c. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- d. Bidang Perikanan Tangkap :
- e. Bidang Perikanan Budidaya :
- f. Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan :
- g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Kelompok Jabatan Pelaksana.



Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan (Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan seperti terlihat pada gambar 2.1)

Uraian tugas masing-masing susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- (1) Diskan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di urusan kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;



- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan usaha perikanan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Diskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 4) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - 5) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
 - d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
 - e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan



dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;

- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 2.1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- 2.2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan I;

III. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; dan
 - 2) kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

- 3.1. Satu Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap



IV. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - 2) kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:

- 4.1. Jabatan Fungsional Analis Akuakultur
- 4.2. Pengelola Kesehatan Ikan dan lingkungan

V. Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan

- (1) Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan;
 - b. pengoordinasian kegiatan dan program yang terdiri dari:



- 1) kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 3) kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 6) program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan dan Usaha Perikanan terdiri dari :

5.1. Satu Jabatan Fungsional

VI. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pengoordinasian program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;



- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

- 6.1. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 6.2. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;

VII. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.

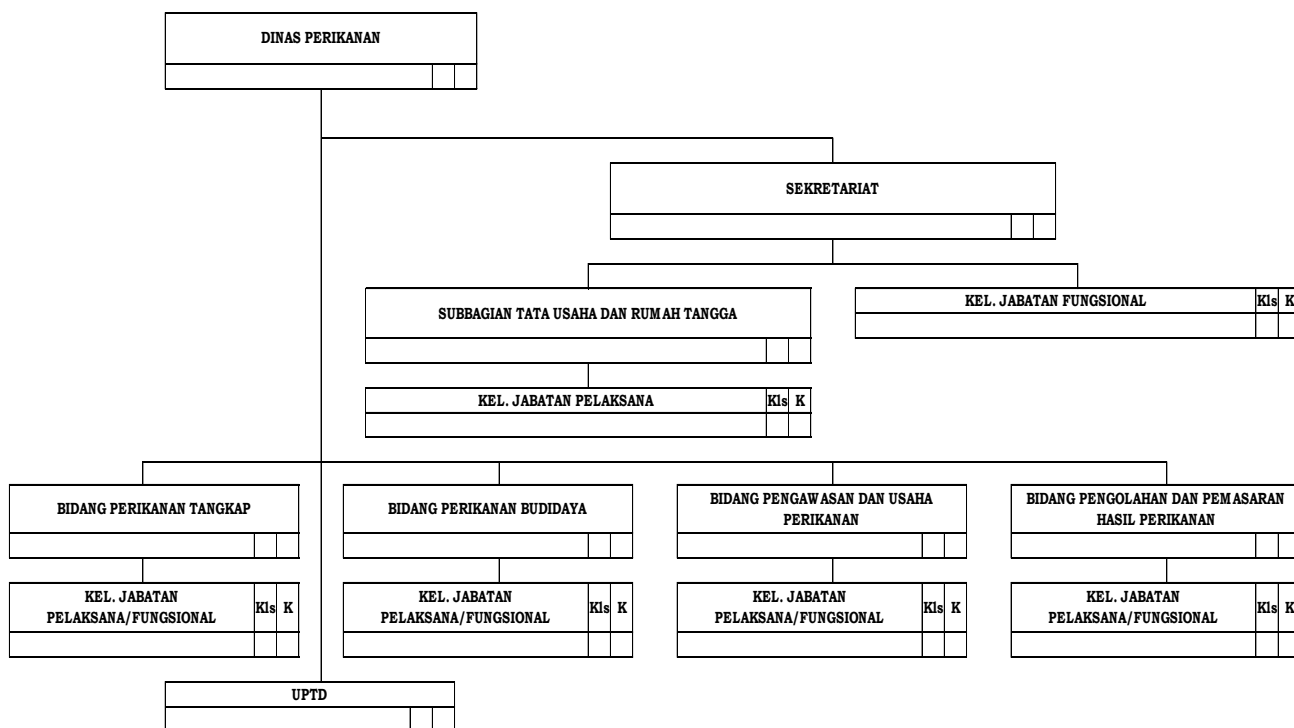
VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
2. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan;
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Perikanan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
 - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERIKANAN



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan per Januari 2025 sebanyak 48 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin
 - 1.1 Laki-laki : 28 orang
 - 1.2 Perempuan : 24 orang
2. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir
 - 2.1 Sarjana Strata 2 : 9 orang
 - 2.2 Sarjana Strata 1/D4 : 18 orang
 - 2.3 Sarjana Muda/Diploma : 5 orang
 - 2.4 Sekolah Lanjutan Atas : 19 orang
 - 2.5 Sekolah Lanjutan Pertama : 1 orang
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan



- 3.1 Golongan IV/c : 1 orang
- 3.2 Golongan IV/b : 0 orang
- 3.3 Golongan IV/a : 9 orang
- 3.4 Golongan III/d : 8 orang
- 3.5 Golongan III/c : 5 orang
- 3.6 Golongan III/b : 4 orang
- 3.7 Golongan III/a : 2 orang
- 3.8 Golongan II/d : 0 orang
- 3.9 Golongan II/c : 4 orang
- 3.10 Golongan II/b : 1 orang
- 3.11 Golongan II/a : 3 orang

**Tabel 2.1**

Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
Per 01 Maret 2025

GOL	LAKI-LAKI						JML	PEREMPUAN						JML	JML. TOTAL
	S2	S1	D3/SM	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D3/SM	SLTA	SLTP	SD		
IV/e															
IV/d															
IV/c	1						1								1
IV/b										0				0	0
IV/a	4	1					5	4						4	9
JML.GOL.IV	5	1					6	4		0				4	10
III/d		2					2				1			1	8
III/c			1				1							0	5
III/b							0							0	4
III/a		3		1			4		6					6	2
JML.GOL.III	0	5	1	1			7	0	6	0	1	0	0	7	14
II/d				1			1							0	
II/c			2				2			1				1	4
II/b							0							0	1
II/a				1	1		2				1			1	3
JML.GOL.II			2	2	1		5	0	0	1	1	0	0	2	7
I/d															
I/c															
I/b															
I/a															
JML.GOL.I							0								0
Jumlah ASN	5	6	3	3	1		18	4	6	1	2			13	31
Honorer (Non PNS)		3	0	7			10	0	3	1	7			11	21
JML.Honorer (Non PNS)		3	0	7			10		3	1	7			11	21
JML.TOTAL	5	9	3	10	1	0	28	4	9	2	9	0	0	24	52

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (data diolah).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa banyaknya SDM yang ada dari segi jumlah sudah memadai namun dari segi kualitas SDM masih rendah sehingga diperlukan peningkatan kualitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

**B. Sarana dan Prasarana**

Dinas Perikanan menempati Kantor di Komplek Gabungan Dinas – Dinas I (GADIS I) Gedung C Jalan Ujang Dewa Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 4 (empat) bidang dan Sekretariat, telah dilengkapi peralatan perlengkapan kerja dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Aset/Modal Dinas Perikanan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aset Tanah :		
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Perikanan)	1.660,00 m ²	
	Tanah Kaveling (dst) Perumahan Nelayan Mansapa	98.820,00 m ²	
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) PPN Mansapa	79.343,00 m ²	
	Tanah Kaveling (dst)	41.484,00m ²	
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	100.353,00m ²	
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) UPR di SP1 Kecamatan Tulin Onsoi	9.000,00 m ²	
2	Aset Kendaraan Dinas :		
	- Dump Truck	1	Baik
	- Mini Bus	1	Rusak Ringan
	- Pick Up	2	Baik
	- Sepeda Motor	24	11 Rusak Berat 13 Baik
	- Speed Boat / Motor Tempel	1	Rusak Berat
3	Aset Bangunan Gedung :		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Baik
	Gedung Pos Jaga Semi Permanen (Desa Tg. Karang Sebatik)		Rusak Berat
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan		Rusak Berat
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) Kec. Nunukan Selatan	1	Baik
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) Kec. Sebatik	1	Rusak Berat



	Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Iting-iting)	1	Rusak Berat
	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor UPR)	1	Baik
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gedung Pakan)	1	Baik
	Bangunan Gudang Lain-lain (dst) Gudang Rumput Laut Mamolo	1	Baik
	Bangunan Gudang Lain-lain (dst) gedung Pengolahan Hasil Perikanan Kelurahan Mansapa	1	Rusak Ringan
	Bangunan Gedung Instalasi Permanen /Rumah Genset UPR	1	Baik
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) / Gedung UPR	1	Baik
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain / Kolam Pembenihan UPR	1	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Cold Storage	1	Rusak Berat
	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen/ Gudang Diskan	1	Baik
	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Rusak Ringan
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen/Ruang Pengolahan Ikan	1	Rusak Ringan
4	Aset Peralatan dan Mesin		
	- P.C Unit	10	8 Baik, 2 Rusak Berat
	- Lap Top	12	Baik
	- Note Book	3	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	17 Baik, 1 Rusak Berat
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
	- Global Positioning System	2	Rusak Berat
	- Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	9	Baik
	- Alat ukur lain- lainnya (GPS)	2	Baik
	- Alat Produksi Perikanan lainnya	3	Rusak Ringan
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Baik
	- Lemari Besi/Metal	2	Baik
	- Lemari Kayu	5	Baik
	- Rak Besi	2	Baik
	- Filing Cabinet Besi	6	Baik
	- Brandkas	2	1 Baik 1 Rusak Ringan
	- Lemari Kaca	1	Rusak Ringan
	- Peta	1	Baik
	- Mesin Absensi	1	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	8	Rusak Berat



- Meja Kerja Kayu	8	Baik
- Meja Rapat	1	Baik
- Meja 1/2 Biro	10	Baik
- Kursi Tamu	2	Baik
- Kursi Putar	2	Baik
- Meja Komputer	1	Baik
- Sofa	3	Baik
- Meubeleur lainnya	1	Baik
- Lemari Es	1	Baik
- A.C. Split	12	2 Rusak Berat 10 Baik
- Kipas Angin	2	Baik
- Alat Dapur lainnya	16	Rusak Berat
- Televisi	2	Baik
- Loudspeaker	1	Baik
- Sound System	1	Baik
- Camera Video (Drone)	2	Baik
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Rusak Berat
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik
- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Baik
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan diarahkan untuk menunjang pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan serta mendorong berkembangnya usaha perikanan rakyat dan membantu tercapainya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha perikanan.

Kondisi prasarana perikanan saat ini masih terbatas baik dalam jumlah dan kapasitasnya serta pengelolaannya pun masih belum optimal. Adapun bentuk sarana dan prasarana perikanan yang ada di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a. Prasarana Penangkapan

Prasarana penangkapan yang ada di Kabupaten Nunukan adalah PPI Sebatik yang terletak di Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara. Selama ini Pos PPI Sebatik difungsikan sebagai Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dan sekarang telah diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta penanganan Sarana prasarana yang merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Perikanan dapat diatur terkait kewenangan menurut amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



b. Prasarana Budidaya

Prasarana Budidaya yang ada di Kabupaten Nunukan antara lain :

1. Terdapat 2 (dua) Unit Gedung Gudang Rumput Laut yang ada di Kecamatan Sebatik Barat dan Nunukan Selatan yang diserahkan ke masyarakat dengan kondisi baik dan dapat difungsikan oleh POKDAKAN.
2. 1 (satu) Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kecamatan Tulin Onsoi dengan kondisi kurang baik dan saat ini sedang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi bangunan sehingga dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
3. Lantai jemur rumput laut yang ada di Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Nunukan Selatan yang diserahkan ke masyarakat dengan kondisi baik dan dapat difungsikan oleh POKDAKAN.

c. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Prasarana Pengolahan dan Pemasaran yang ada di Kabupaten Nunukan adalah 3 (tiga) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Utara yang diserahkan ke masyarakat dengan kondisi baik dan dapat difungsikan oleh POKLAHSAR.



2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode renstra sebelumnya (Tahun 2021-2025) hingga Tahun 2025) dan periode sekarang (Tahun 2025-2029) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan telah menetapkan sasaran / target kinerja SKPD dimana tingkat capaian kinerja untuk masing-masing sasaran / target disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perikanan Tahun 2021 - 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGs (√)	Target IKU / IKK (√)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				(2020) (th.dasar)	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Produksi Perikanan Tangkap	√	√	4.248,60	4.327,28	4.420,63	4.505,64	4.590,66		4.250,61	4.373,41	4.460,87	4.509,90	5.684,55		100,05	101,07	100,91	100,09	123,83	
2	Produksi Perikanan budidaya	√	√	338.307,40	349.220,54	358.746,25	365.515,05	372.283,85		338.439,87	417.086,64	588.352,22	765.161,75	597.769,18		100,04	119,43	164,00	209,34	160,57	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				72,67	72,67	72,82	72,97	73,12		72,67	73,91	74,99	79,65		0,00	100,00	101,71	102,98	109,15	



Berdasarkan tabel 2.3 diatas terlihat bahwa kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menunjukkan dinamika yang menggambarkan keberhasilan pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Uraian capaian kinerja dan tantangan masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

1. Perikanan Tangkap

Sasaran perikanan tangkap adalah “ **Meningkatnya Produksi Perikanan Tagkap**”. Perikanan Tangkap di Kabupaten Nunukan terdiri dari perikanan laut dan perairan umum (sungai). Wilayah penangkapan untuk perairan laut adalah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat dan Kecamatan Sembakung. Sedangkan wilayah penangkapan perairan umum berada di Kecamatan Sembakung, Lumbis, Sebuku, Krayan dan Krayan Selatan. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas pencapaian sasaran bidang perikanan tangkap mengalami fluktuasi, dimana dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 pencapaian sasaran dan target mengalami peningkatan. Pencapaian target kinerja sasaran pada kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2024 untuk bidang perikanan tangkap tercapai secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pembangunan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pada Dinas Perikanan.
2. Proses pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang dilakukan secara kontinyu oleh Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan baik melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
3. Dukungan dari Perbankan dan Lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kemudahan akses permodalan untuk meningkatkan usaha perikanan.
4. Komoditi hasil perikanan yang masih memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi daya tarik bagi pelaku usaha perikanan untuk tetap menjalankan usaha disektor perikanan tangkap.
5. Kemitraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dengan investor (pedagang) terjalin cukup baik sehingga komoditi hasil

perikanan masih dapat dipasarkan terutama ke Tawau, Makassar dan Surabaya.



2. Perikanan Budidaya

Sasaran kinerja pelayan perikanan budidaya adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”**. Perikanan Budidaya di wilayah Kabupaten Nunukan terdiri dari budidaya laut yang didominasi budidaya rumput laut, budidaya air payau dengan konsentrasi budidaya tambak, budidaya air tawar dengan sistem budidaya kolam, budidaya keramba dan budidaya sawah dengan sistem minapadi. Target pencapaian indikator sasaran untuk sektor perikanan budidaya pada kurun waktu Tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Budidaya Laut (Rumput Laut) : Animo masyarakat untuk membudidayakan rumput laut sangat tinggi yang ditandai dengan peningkatan RTP dan luas areal budidaya, kepastian pasar komoditas rumput laut dan didukung transportasi antar pulau yang efektif dan efisien, bantuan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Perikanan kepada pembudidaya telah menunjukkan peningkatan hasil produksi, sebagian besar potensi budidaya laut (rumput laut) telah dimanfaatkan dan dikembangkan, dukungan dan kerjasama semua pihak baik pemanfaat langsung maupun tidak langsung, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Budidaya Tambak : meningkatnya budidaya tambak khususnya budidaya bandeng disebabkan pembudidaya tambak sudah mulai kembali membuka lahan-lahan tambak mereka yang telah lama tidak beroperasi, dengan adanya sarana dan prasarana (excavator) dari instansi terkait untuk membantu masyarakat memperbaiki kembali lahan-lahan tambak dengan biaya operasional yang lebih murah;



3. Budidaya Kolam : terjadi peningkatan produksi khususnya di beberapa kecamatan kabupaten nunukan.



Selanjutnya analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran akan mencerminkan sejauh mana pemanfaatan sumber daya (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut disajikan capaian realisasi pendanaan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel 2.4 di bawah ini :



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.329.778.205,00	5.029.468.121,00	4.496.554.497,00	4.697.057.022,00	4.869.385.054,00	5.453.022.753,00	4.884.939.962	4.802.162.807,00	4.177.076.775,00	4.357.315.287,00	4.623.339.079,00	91,65	95,48	92,90	92,77	94,95	0,01	-0,01
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.836.542.000,00	1.753.248.200,00	2.207.425.600,00	3.349.583.410,00	2.154.572.405,00	1.140.269.460,00	2.589.566.875	1.706.572.945,00	2.028.052.880,00	2.973.364.405,00	2.110.576.325,00	91,29	97,34	91,87	88,77	97,96	-0,09	0,09
3	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	3.576.221.000,00	504.793.400,00	2.521.055.497,00	8.892.413.868,00	6.673.595.125,00	3.312.543.550,00	2.885.142.416	442.757.700,00	2.427.910.862,00	8.307.686.659,00	6.002.638.829,00	80,68	87,71	96,31	93,42	89,95	0,98	1,45
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	12.190.000,00	68.508.000,00	68.507.565,00	50.993.600,00	-	-	10.083.000,00	65.123.000,00	65.817.115,00	-	0,00	82,72	95,06	96,07	20,87	26,37
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	516.16.000,00	245.270.840,00	1872.540.730,00	191.593.875,00	-	-	42.214.600,00	20.1437.530,00	18.19.906.601,00	-	0,00	81,79	82,13	97,19	21,90	27,95
	Total Anggaran	11.742.541.205,00	7.287.509.721,00	9.288.841.594,00	17.252.833.140,00	15.638.600.879,00	10.148.423.238,00	10.359.649.253,10	6.951.493.452,00	8.685.338.107,00	15.904.926.881,00	14.622.277.949,00	88,22	95,39	93,50	92,19	93,50	12,53	11,15



Dari tabel diatas, dapat dilihat pada Tahun 2021 rasio antara realisasi penyerapan anggaran dapat dikatakan baik, pada Tahun 2023 kurang baik. rasio realisasi penyerapan anggaran baik disebabkan oleh progres pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga semua kegiatan dapat terselesaikan. Pada Tahun 2023 rasio penyerapan anggaran dikatakan kurang baik dimana sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin karena adanya devisit Anggaran sehingga terlambatnya progress pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pembinaan dan pengembangan SDM juga masih terbatas dan belum adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan kegiatan. selain itu menurunnya penyerapan anggaran pada tahun 2023 disebabkan kelalaian pihak penyedia yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai akhir tahun 2023.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. indentifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan identifikasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menetapkan kelompok sasaran untuk 5 (lima) tahun ke depan (2026 - 2030) antara lain :

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pelaku usaha bidang perikanan tangkap;
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) untuk pelaku usaha bidang perikanan budidaya; dan
3. Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) untuk pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan urusan perikanan. Adapun mitra kerja yang diharapkan dapat membantu kelancaran pelayanan antara lain :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia;
2. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) KKP Bitung;
3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) KKP Takalar;
4. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (KKP);
5. Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP;
6. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) KKP Sebatik;
7. Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Tarakan;
8. Balai Karantina Kalimantan Utara;
9. Kantor Pertanahan Nunukan (Kementerian ATR/BPN);
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan;
14. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan;
15. Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kabupaten Nunukan;
16. Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan;
17. Media Elektronik dan Cetak.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan



eksternal dan internal terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana perikanan;
Permasalahan tersebut disebabkan dari kurangnya akses permodalan sehingga kemampuan pelaku usaha untuk menyiapkan sarana masih relatif rendah.
2. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan;
Rendahnya kuantitas dan kualitas teknis SDM Aparatur perikanan serta minimnya akses dan penguasaan informasi bagi pelaku usaha perikanan merupakan salah satu penyebab permasalahan tersebut.
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya, nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan;
Belum optimalnya pelatihan peningkatan SDM yang dilakukan sampai ke semua wilayah Kabupaten Nunukan serta minimnya informasi yang diterima dan diusahakan oleh pelaku usaha perikanan menyebabkan munculnya permasalahan sebagaimana tersebut di atas.
5. Nilai Produksi Komoditas Perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) masih rendah;
Hal ini terjadi karena belum optimalnya prasarana pendukung dan regulasi tata niaga komoditas unggulan serta akses pemasaran yang masih terbatas dan belum tertata dengan baik.
6. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan merupakan salah satu permasalahan yang muncul akibat belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaku usaha perikanan terkait aturan yang berlaku.



Tabel 2.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 Hingga Akhir Tahun 2024

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Minimnya sarana dan prasarana perikanan;	Sarana dan Prasarana Perikanan yang tersedia belum berfungsi secara optimal	Kemampuan untuk menyiapkan Sarana prasarana relatif rendah karena kurangnya akses permodalan
2.	Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan;	Rendahnya Kuantitas dan Kualitas Teknis SDM Aparatur perikanan	Minimnya akses dan penguasaan informasi bagi pelaku usaha perikanan
3.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya, nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan;	Pelatihan peningkatan SDM belum dilakukan secara optimal ke semua wilayah Kabupaten Nunukan demikian pula dengan jenis pelatihan	Minimnya informasi yang diterima dan diusahakan oleh pelaku usaha perikanan
4.	Nilai Produksi Komoditas Perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) masih rendah;	Belum optimalnya prasarana pendukung dan regulasi tata niaga komoditas unggulan oleh instansi terkait	Akses pemasaran yang masih terbatas dan belum tertata
5.	Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan	Belum optimalnya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku



Tabel 2.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap
Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumberdaya lokal	Tujuan “Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan” Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan”	“Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan”. “Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan”	1. Minimnya sarana dan prasarana perikanan; 2. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan; 3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya, nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan; 4. Nilai Produksi Komoditas Perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) masih rendah; 5. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan;	1. masih besarnya potensi sumber daya perikanan; 2. permintaan pasar terhadap komoditi perikanan sangat tinggi; 3. ketersediaan tenaga kerja; 4. Letak strategis kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan; 5. Kegiatan perikanan yang semakin berkembang; 6. Adanya dukungan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal pengembangan perikanan;	1. Sarana prasarana Perikanan belum optimal 2. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan; 3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya, nelayan, dan pengolah serta pemasar; 4. Nilai Produksi Komoditas Perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) masih rendah



				7. tersedianya atau semakin berkembangnya IPTEK dan informasi bidang perikanan;	5. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan ;
--	--	--	--	---	--

2.2.1.1. Telaah Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat mempengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global telah memicu peningkatan suhu permukaan laut, naiknya air laut, cuaca ekstrem, dan abrasi pesisir. Kondisi ini menyebabkan gangguan terhadap ekosistem pesisir, terumbu karang, hingga siklus hidup ikan, yang berdampak pada hasil tangkapan dan kegiatan budidaya. Sebagai respons, Dinas Perikanan perlu memperkuat program adaptasi perubahan iklim.

2. Krisis Ekonomi Global

Fluktuasi ekonomi dunia berdampak langsung pada nilai tukar, harga komoditas ekspor perikanan, dan permintaan pasar internasional. Krisis ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha perikanan dan menurunnya daya beli masyarakat pesisir. Dinas Perikanan perlu mendorong diversifikasi pasar, penguatan pasar domestik, dan pemberdayaan usaha kecil menengah dalam rantai pasok perikanan.



3. Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi global mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan. Hal ini membuka peluang dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, namun juga menuntut kesiapan SDM dan infrastruktur. Dinas Perikanan perlu mengembangkan sistem informasi perikanan, seperti e-logbook dan pemetaan GIS, serta mendorong peningkatan literasi digital bagi nelayan dan pembudidaya.

4. Standar Perdagangan Global dan Sertifikasi Internasional

Semakin ketatnya regulasi perdagangan internasional, khususnya terkait dengan keamanan pangan dan mutu produk perikanan (seperti HACCP, GMP, dan traceability), menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan dan sertifikasi bagi pelaku pengolahan hasil perikanan agar produk lokal mampu bersaing di pasar global.

5. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Agenda SDGs menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 14 (Ekosistem Laut). Dinas Perikanan harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

2.2.1.2. Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 berfokus pada Ekonomi Biru untuk mencapai masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan presiden terpilih. KKP akan meningkatkan daya saing industri perikanan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan penguatan regulasi serta sistem pengawasan mutu untuk mendukung ketahanan pangan dan kemajuan ekonomi.

Adapun isu strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut, hal ini mendukung Asta Cita ke-2 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

2. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan

Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan, yang direfleksikan melalui peningkatan nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Program penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya perlu diperkuat untuk mencapai tujuan ini, sesuai dengan **Asta Cita ke-2** tentang peningkatan produktivitas hasil perikanan dan daya saing.

3. Peningkatan kualitas produk perikanan dan peningkatan nilai tambah produk

Peningkatan kualitas produk dan peningkatan nilai tambah produk merupakan agenda penting yang juga diusung dalam Renstra KKP. Dinas Perikanan akan berupaya mewujudkannya melalui penguatan regulasi dan sistem pengawasan kualitas dan mutu produk perikanan, pengembangan hilirisasi sektor



perikanan untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

4. Peningkatan ketahanan pangan berbasis produk perikanan

Peningkatan ketahanan pangan berbasis produk perikanan menjadi isu strategis nasional yang sangat relevan dengan daerah. Program kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN), edukasi gizi, dan penguatan konsumsi ikan lokal.

Dengan menyelaraskan isu strategis KKP dengan rencana pembangunan daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.1.3 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Renstra DKP provinsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Produktivitas perikanan budidaya rendah akibat keterbatasan teknologi, legalitas lahan, dan daya saing komoditas.
3. Penerapan RZWP3K dan pengelolaan ruang laut terintegrasi serta penguatan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
4. Rendahnya nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan yang perlu didukung peningkatan infrastruktur dan investasi
5. Masih rendahnya kualitas SDM dan regenerasi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
6. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum efektif, terutama di wilayah perbatasan 0-12 mil.
7. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir dan konservasi ekosistem pesisir serta mitigasi abrasi.



8. Belum terintegrasinya tata kelola sektor kelautan dan perikanan serta belum mendukung ekonomi biru secara optimal
9. Terbatasnya fasilitas investasi Kelautan dan Perikanan (KP) di wilayah strategis perbatasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
10. Belum optimalnya sistem informasi kelautan dan perikanan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan.

Hasil analisis terhadap isu tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara merumuskan tujuan Renstra DKP Provinsi Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat perikanan yang berkelanjutan” dengan sasaran “meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan, meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, mengefektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatnya tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang terpadu.

Dari beberapa isu sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang terkait dengan perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini membutuhkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah daerah sehingga tujuan dan sasaran peningkatan produksi perikanan dapat tercapai. Dinas perikanan akan mendukung pencapaian tersebut dengan peningkatan sarana dan prasarana perikanan yang memadai.
2. Produktivitas perikanan budidaya rendah akibat keterbatasan teknologi, legalitas lahan, dan daya saing komoditas. Dukungan dari Dinas perikanan Kabupaten Nunukan terkait penyelesaian isu tersebut adalah melaksanakan program pengelolaan perikanan budidaya melalui kegiatan pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil.
3. Rendahnya nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan yang perlu didukung peningkatan infrastruktur dan investasi. Terkait penyelesaian isu ini Dinas perikanan kabupaten nunukan akan melaksanakan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



4. Masih rendahnya kualitas SDM dan regenerasi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Isu ini merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.2.1.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (*lima*) tahun mendatang. Hasil telaah struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Hasil Telaah Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap kebutuhan pelayanan PD	Permasalahan PD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Pelabuhan Perikanan Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Mansapa	Kec. Nunukan Selatan; SKPT Sebatik di Kec. Sebatik Utara;	Prioritas program pengembangan kawasan peruntukan perikanan, meliputi : 1. Pengembangan prasarana perikanan yang bersinergitas pada pelabuhan perikanan 2. Peningkatan produksi perikanan 3. Pengembangan usaha perikanan dari hulu hingga hilir (hilirisasi)	Belum maksimalnya sinergitas antara pemerintah dan stakeholder di bidang perikanan di kabupaten Nunukan	Potensi sumber daya laut dan pelaku usaha perikanan yang cukup besar	Terbatasnya Kewenangan pemerintah Kabupaten



Kawasan Perikanan Tangkap Pengembangan teknologi perikanan tangkap	Kec. Nunukan Selatan	Sesuai	Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan Tangkap; Masihrendahnya kualitasSDMNelayan	1. Permintaan pasar terhadap komoditi perikanan sangat tinggi; 2. Ketersediaan tenaga kerja;	1. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan, 2. Tingkat pendidikan SDM nelayan relatif rendah
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kecamatan Nunukan Selatan	Sesuai	Minimnya sarana dan prasarana perikanan;	1. Masih besarnya potensi sumber daya perikanan; 2. Daya dukung lingkungan perairan yang masih sesuai/baik	1. Belum adanya pelabuhan perikanan yang bersinergitas 2. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang laut
Pengembangan pengolahan hasil hasil perikanan tangkap	Kecamatan Nunukan Selatan	Sesuai	Belum adanya industri pengolahan produk perikanan	Potensi hasil perikanan yang cukup besar	Belum tersedianya sarana pendukung pengolahan hasil perikanan
Kawasan Perikanan Budidaya Pengembangan produksi perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya	Kec. Nunukan; Nunukan Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Kecamatan Sembakung.	Sesuai	Usaha budidaya ikan pada umumnya(sebagian besar) dilakukan sebagai pekerjaan sambilan	Potensi dan daya dukung lingkungan budidaya masih dapat dikembangkan	Penguasaan IPTEK dan Informasi budidaya masih terbatas (tradisional)
Pengembangan Budidaya perikanan air payau (rencana tambak)	Kecamatan Nunukan; Nunukan Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik	Sesuai	Rendahnya prpduktivitas hasil budidaya tambak	Potensi luas areal budidaya tambak yang luas dan daya dukung lingkungan budidaya yang masih sesuai	1. Penguasaan IPTEK dan Informasi budidaya masih terbatas (tradisional) 2. Akses ke lokasi



	Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Sembakung.				budidaya yang masih sulit 3. Biaya produksi yang relatif tinggi
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan pengairan untuk tambak	Kecamatan Nunukan; Nunukan Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Sembakung.	Sesuai	Jumlah lahan tambak yang tidak produktif cukup banyak	Potensi luas areal budidaya tambak yang luas dan daya dukung lingkungan budidaya yang masih sesuai	1. Penguasaan IPTEK dan Informasi budidaya masih terbatas (tradisional) 2. Akses ke lokasi budidaya yang masih sulit 3. Biaya produksi yang relatif tinggi
Pengembangan teknologi perikanan	Kecamatan Nunukan; Nunukan Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Sembakung.	Sesuai	1. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan Budidaya; 2. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur dan SDM Pembudidaya 3. Keterbatasan anggaran pengembangan	4. Permintaan pasar terhadap komoditi perikanan sangat tinggi; 5. Ketersediaan tenaga kerja; 6. Luasnya lahan budidaya yang potensinya belum dimanfaatkan	1. Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan budidaya, 2. Tingkat pendidikan SDM pembudidaya relatif rendah 3. Biaya produksi yang tinggi
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan	Kecamatan Nunukan; Nunukan Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Sembakung.	Sesuai	Minimnya sarana dan prasarana perikanan;	1. Masih besarnya potensi sumber daya perikanan; 2. Daya dukung lingkungan perairan yang masih sesuai/baik	1. Belum adanya pelabuhan perikanan yang bersinergitas 2. Ketidaksiapan pemanfaatan ruang laut
Pengembangan pengolahan hasil-hasil	Kecamatan Nunukan; Nunukan	Sesuai	1. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengolah	Potensi hasil perikanan	1. Kurangnya daya tarik



perikanan	Selatan; Sebatik; Sebatik Barat; Sebatik Timur; Sebatik Utara; Sebuku; Sei Menggaris; dan Sembakung.		hasil perikanan 2. Belum adanya industri pengolahan produk perikanan	yang cukup besar	masyarakat untuk mengkonsum si hasil olahan perikanan 2. Belum tersedianya sarana pendukung pengolahan hasil perikanan
-----------	---	--	--	---------------------	---

Dari tabel terlihat bahwa prioritas pengembangan kawasan industri perikanan terpadu (*Marine Technopark*) Mansapa dan SKPT Sebatik serta pengembangan perikanan di Pulau Nunukan, Sebatik, Sei Menggaris dan Kecamatan Sembakung telah sesuai dengan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan, Khusus untuk Pulau Nunukan merupakan pusat kegiatan PKW yang di lokasi tersebut juga terdapat KSK PPN Mansapa. Sedangkan untuk Pulau Sebatik selain sebagai PKSN juga sebagai KSK KTM Bahari, dan PKWp. Penelaahan rencana tata ruang juga dilakukan untuk melihat rencana pola ruang wilayah. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

2.2.1.5. Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS 7RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan KLHD RPJMD terdapat 4 (empat) isu pembangunan berkelanjutan strategis yang menjadi prioritas isu untuk pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu : (1) air bersih dan sanitasi layak; (2) pencemaran tanah, air, dan udara; (3) pintu masuk tenaga kerja dan barang ilegal; dan (4) bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi).



Dari beberapa isu-isu strategis tersebut, isu yang relevan dengan Renstra Dinas Perikanan adalah pencemaran tanah, air, dan udara.

Limbah dari kegiatan budidaya rumput laut berupa botol plastik bekas pakai menyebabkan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan pencemaran di wilayah pesisir dan berpengaruh pada habitat laut dan kualitas hasil perikanan.

2.2.1.6. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nunukan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan adalah **“Hilirisasi sektor-sektor esensial fokus pada pertanian dan perikanan kelautan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan”**.

Hilirisasi sebagai proses pengolahan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, sektor pertanian, perikanan dan kelautan memiliki peran strategis yang sangat besar dalam mengungkit

perekonomian. Oleh karena itu, hilirisasi pada sektor-sektor esensial ini menjadi kunci penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi ini mencakup upaya untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan menjual produk mentah. tetapi, infrastruktur dan fasilitas pengolahan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan petani dan nelayan, menghambat perkembangan hilirisasi ini. Akibatnya, banyak



produk pertanian dan perikanan yang dijual dalam bentuk mentah dengan harga rendah, sehingga pendapatan petani dan nelayan tetap minim dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Dinas perikanan Kabupaten Nunukan akan menindaklanjuti isu tersebut melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya kalau kita memanfaatkan potensi yang begitu besar otomatis peluang di masa 5 (lima) tahun mendatang akan meningkat secara tajam terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Isu – isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan factor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan mempunyai beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan Renstra KKP-RI dan Renstra DKP Propinsi Kalimantan Utara, telaahan RPJMD, KLHS RPJMD, serta telaahan tata ruang wilayah, sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan dan hasil telaah beberapa dokumen yang tercantum di atas, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Dinas perikanan ke depan. Rumusan isu strategis Dinas Perikanan tertera pada tabel berikut ini :



Tabel 2.8
RUMUSAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS STRATEGIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi lestari Perikanan Tangkap dan Budidaya dengan posisi Strategis di Perbatasan Negara	Sarana dan Prasarana Perikanan belum memadai	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perikanan	- Kerusakan Habitat laut - Perubahan Iklim	Program Ekonomi Biru / Penangkapan ikan terukur berbasis kuota/ Pengembangan Budidaya berkelanjutan/ Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan	- Penggunaan Alat Tangkap tidak ramah lingkungan - Konflik zona tangkap, Budidaya dan perbatasan antar negara - Optimalisasi pengolahan dan pemasaran	Belum Optimalnya Pemanfaatan dan pengelolaan potensi Perikanan
	Rendahnya Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan	Manajemen Kelembagaan dan pengelolaan keuangan pelaku usaha perikanan yang masih minim	Rendahnya kualitas SDM ,kurang pelatihan dan Pendidikan yang memadai serta tantangan dalam penerapan standar internasional Teknologi	Peningkatan kualitas dan kuantitas perikanan menjadi krusial untuk mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, terutama daerah pasar bebas seperti masyarakat ekonomi Asean	- Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), penangkapan ikan berlebihan (overfishing), kemiskinan nelayan, lemahnya infrastruktur dan regulasi perikanan, serta dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah plastik laut. - Pengelolaan perikanan budidaya belum mengikuti standar pengelolaan perikanan budidaya (CBIB, CPiB, CPPiB, CPOiB)	
Lahan tambak yang cukup luas	- Status lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan/legalitas lahan - Keterbatasan teknologi dan minimnya Pupuk, Pakan dan Bibit Unggul	Belum Optimalnya Pengelolaan lahan tambak	Dampak perubahan iklim terhadap produksi Budidaya - Permintaan Pasar global	Revitalisasi Tambak dan Industrialisasi perikanan Budidaya, - Legalitas lahan tambak	Konflik Ruang Budidaya dengan Konservasi	Produktivitas perikanan budidaya dan daya saing komoditas relatif rendah
Produksi Rumput laut di Nunukan cukup besar	- Harga Jual Rumput Laut ditingkat Pembudidaya tidak stabil - Ketergantungan pada Penjualan Bahan Mentah - Penanganan limbah budidaya rumput laut yang tidak tertangani secara optimal	Pencemaran tanah, air, dan udara	- Pencemaran Lingkungan dari Limbah Plastik menyebabkan kerusakan habitat laut	- Konflik Nelayan dan Pembudidaya - Dampak Pencemaran Sampah plastik dari kegiatan budidaya	- Serangan Hama dan Penyakit - Tata Niaga yang belum tertata baik - Keterbatasan Bibit Rumput Laut yang berkualitas	Nilai Jual yang didapatkan pembudidaya tidak stabil disebabkan kualitas produksi rumput laut belum sesuai standar
	Prasarana dan Sarana Budidaya Perikanan belum memadai	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Budidaya	Kerusakan habitat Laut	Dugaan beberapa jenis ikan mengandung nano plastik	Dampak pencemaran sampah plastik dari kegiatan budidaya	



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS STRATEGIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi bahan baku untuk pengolahan ikan melimpah	- Belum maksimalnya Pendampingan dan Pelatihan serta akses informasi perijinan usaha kepada pelaku usaha pengolahan '- Minat pengolah untuk menjadikan usahanya sebagai mata pencaharian utama masih rendah	- Terbatasnya Sarana prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan '- Belum optimalnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi unggulan' '- Masih terbatasnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan	- Keamanan Pangan '- Standar dagang global, persaingan pasar internasional	- Standarisasi Sarpras Pengolahan dan Pemasaran '- Pengembangan hilirisasi produk rumput laut dan perikanan, peningkatan infrastruktur	- Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Yang Memenuhi Standar '- Keterbatasan logistik dan infrastruktur pengolahan hasil perikanan ditingkat regional	Rendahnya nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan
	Menurunnya pendapatan pelaku usaha perikanan dan Harga ikan tidak stabil	Perubahan Iklim	Permintaan pasar dunia	Daya dukung lingkungan Perairan yang menurun	Tata niaga hasil perikanan belum optimal	
	Bangunan Pasar Ikan dan Pengelolaan yang tidak memenuhi standar	Bangunan Pasar Ikan dan Pengelolaan yang tidak memenuhi standar	Keamanan Pangan	Kemudahan Akses Pemasaran	Belum adanya bangunan pasar yang memenuhi standar	
	Tumpang tindih Zonasi perikanan dan Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap aturan yang berlaku	Terjadinya Konflik antara pengguna ruang laut	keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana, penegakan hukum yang tidak konsisten, tata kelola yang belum efektif, serta masalah khusus seperti illegal fishing, overfishing, dan praktik budidaya yang tidak sesuai standar, terutama pada sektor budidaya yang masih kurang diawasi secara optimal.	Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana pengawasan, tata kelola yang belum efisien, serta penegakan hukum yang belum konsisten.	- Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan, ' '- Belum optimalnya Penegakan aturan bidang kelautan dan perikanan yang berlaku,	Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan



Penjelasan latar belakang munculnya isu strategis yang telah ditetapkan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah sarana prasarana perikanan belum memadai, rendahnya kualitas dan kapasitas SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan, minimnya IPTEK dan informasi bidang perikanan.
2. Rendahnya nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan. Isu ini disebabkan oleh belum maksimalnya pendampingan dan pelatihan serta akses informasi kepada pelaku usaha pengolahan, sistem pengawasan kualitas dan mutu produk perikanan belum optimal, minat pengolah untuk menjadikan usahanya sebagai mata pencaharian utama masih rendah, serta sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap aturan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan disebabkan rendahnya pengetahuan dan informasi terkait aturan bidang perikanan yang berlaku, belum optimalnya penegakan aturan bidang kelautan dan perikanan yang berlaku, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan pengawasan perikanan.
4. Rendahnya daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional. Hal ini disebabkan kualitas dan mutu produk perikanan belum memenuhi standar pasar yang ditetapkan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan strategis. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD. Tujuan dari rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 adalah **“Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan”**

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Visi Misi Kabupaten Nunukan

Sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Sasaran perangkat daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

VISI RPJMD KABUPATEN NUNUKAN 2025 - 2029

KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI

Adapun misi Kabupaten Nunukan dalam mendukung tercapainya visi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berkarakter

Misi 2 : Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas



Misi 4 : Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata

Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berperan dalam mendukung misi 2 **“Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”**,

Tujuan 1 “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang akseleratif melalui pengelolaan potensi dan sumber daya lokal” dan **Sasaran 1** “Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan”. Sasaran dari RPJMD tersebut menjadi tujuan Dinas yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran perangkat daerah. Sasaran rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”**. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar dan tabel 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Cascading Renstra Dinas Perikanan 2026-2030

Sasaran RPJMD	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan	
Tujuan PD	Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	
Sasaran PD	Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	Jumlah Produksi Perikanan	Nilai Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan Perangkat Daerah
Urusan	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	



Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2026 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan		Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	9,46	9,7	9,94	10,18	10,43	10,67	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	615522,79	627591,87	639660,94	651730,01	663799,10	675868,17	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	A	A	A	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Strategi Renstra Dinas Perikanan merupakan rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis .

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah pada tahun 2025 - 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :



Tabel 3.2
Sasaran dan Strategi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI
1.	Minimnya sarana dan prasarana perikanan;	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Meningkatny a Produksi Perikanan Meningkatny a Pelaku Usaha Perikanan yang patuh terhadap aturan yang berlaku	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
2.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pembudidaya, nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan	Rendahnya nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan		
3.	Minimnya penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan;	Rendahnya daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional		
4.	Nilai Produksi Komoditas Perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) masih rendah			
5.	Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan	Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		



Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas
Perikanan Tahun 2025 - 2029

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	1. Mengembangkan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 2. Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan 3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan 4. Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk perikanan 5. Peningkatan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6. Meningkatkan Pembinaan pelaku Usaha Pengolahan dan pemasaran skala kecil dan skala mikro 7. Meningkatkan sarana pemasaran dan keamanan pangan produk hasil perikanan



			8. Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang efektif dan efisien, peningkatan tata kelola administrasi barang milik daerah.

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan sebagaimana tertera pada tabel di atas dirumuskan untuk menjawab permasalahan pelayanan bidang perikanan dan mendukung program daerah 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjelasan dari masing-masing strategi yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”.

Strategi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel diatas melalui beberapa hal sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana prasarana perikanan, peningkatan kualitas SDM pembudidaya, nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan, dan peningkatan penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan;
- Meningkatkan nilai produksi komoditas perikanan di tingkat produsen (Pembudidaya, Nelayan, Pengolah) yang masih rendah, meningkatkan penguasaan IPTEK dan informasi bidang perikanan sehingga nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dapat meningkat.



- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan dan penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Sektor perikanan sehingga rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha perikanan serta konflik antar pengguna ruang laut dapat terselesaikan. Upaya-upaya ini mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan.
2. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Strategi ini ditetapkan untuk menjawab belum optimalnya dukungan pelayanan administrasi penunjang urusan perikanan serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah yang belum maksimal. Strategi tersebut mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah



Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan
Tahun 2025 - 2029

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Perikanan	1. Mengembangkan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 2. Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan 3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan 4. Peningkatan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Meningkatkan Pembinaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala kecil dan skala mikro 6. Meningkatkan sarana pemasaran dan keamanan pangan produk hasil perikanan; 7. Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah



3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan pembangunan adalah gambaran prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

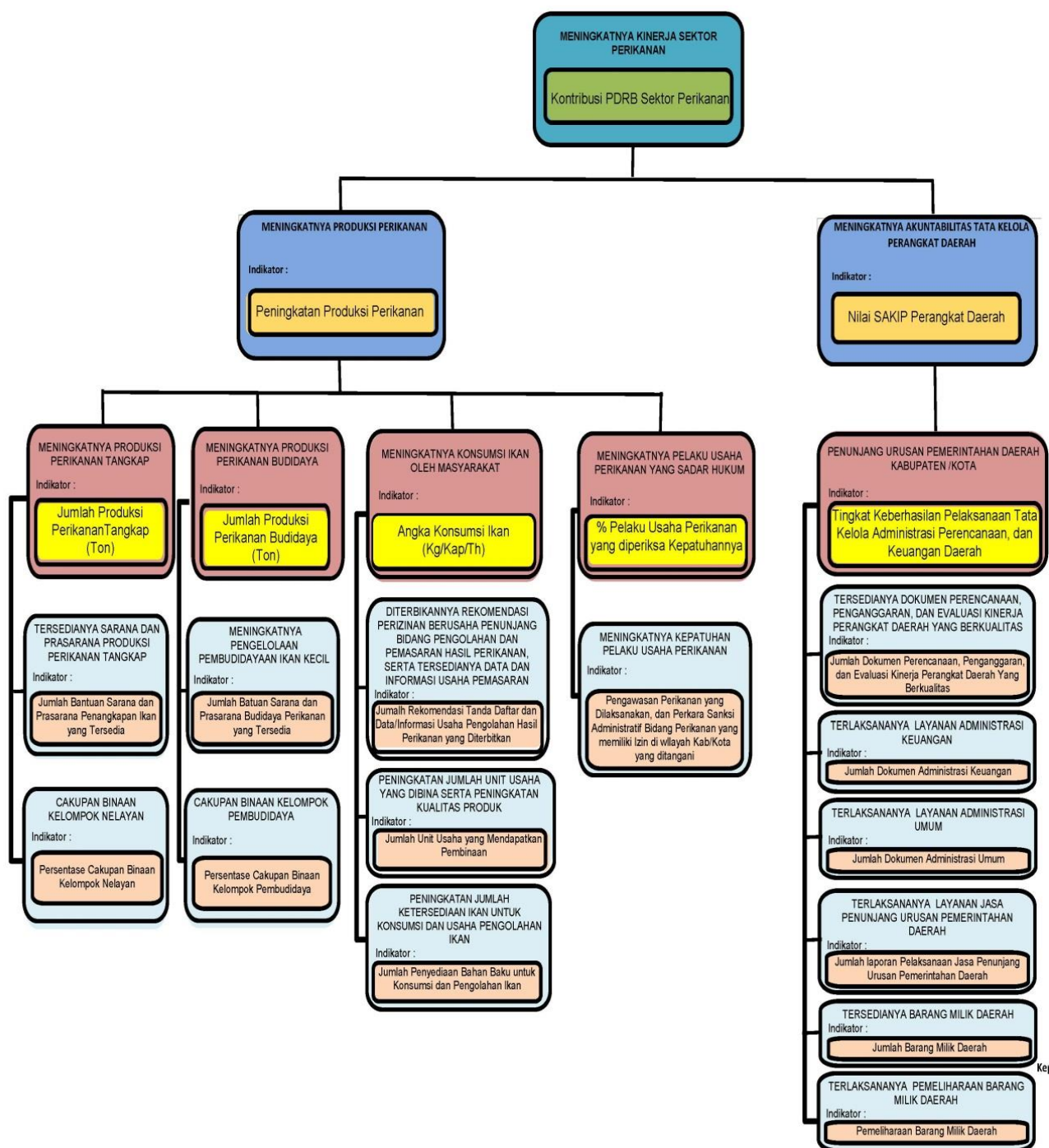
Tabel 3.5
Matriks Penahapan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2026 - 2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan fondasi tata kelola melalui penataan regulasi, legalitas usaha, integrasi data, Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha perikanan serta Penguatan koordinasi lintas sektoral	Penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi untuk mendukung Perikanan Tangkap dan Budidaya yang berkelanjutan	Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, seta Pelayanan Publik yang lebih Optimal,	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi sektor Perikanan	Pengembangan Hilirisasi Sektor Perikanan serta Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Gambar 3.2

Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029



BAB IV

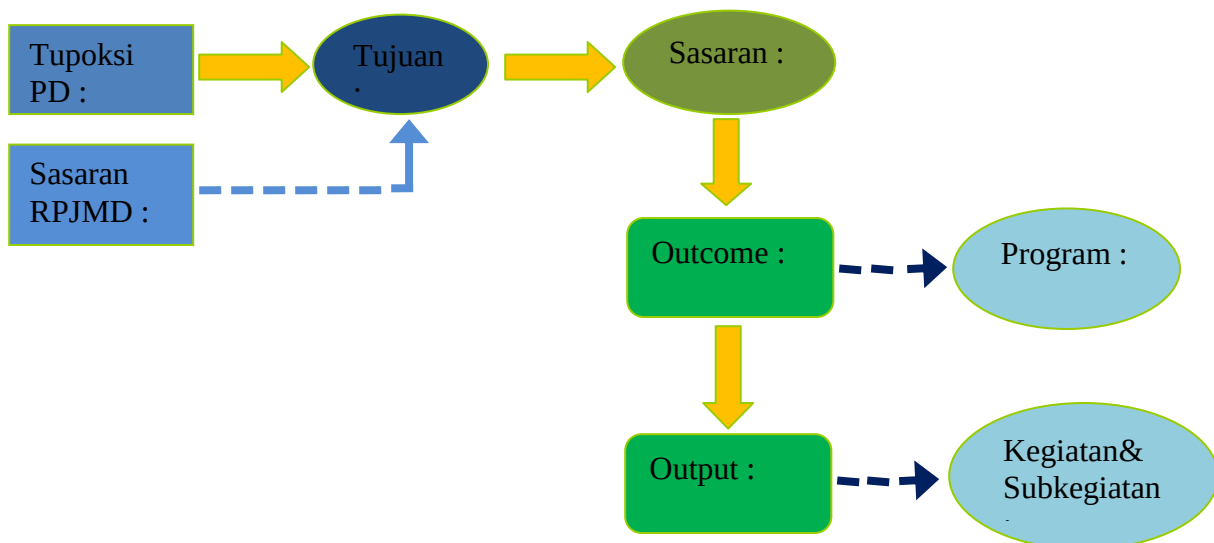
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERIKANAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Bab ini akan menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, untuk masing-masing rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Indikator Kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program dan indikator output kegiatan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai. Kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan rencana strategi Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan





Tabel 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.430.731.403,56		10.589.880.207,01		10.691.878.048,56		10.786.716.974,51		10.924.660.289,39	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.604.714.579,00		5.690.229.543,00		5.745.035.746,00		5.795.995.271,00		5.870.115.951,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	79,65	80,45	81,25	5.604.714.579,00	82,06	5.690.229.543,00	82,88	5.745.035.746,00	83,71	5.795.995.271,00	84,55	5.870.115.951,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.171.989.400,00		1.189.871.244,00		1.201.331.648,00		1.211.987.680,00		1.227.486.891,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5.684,55	5.798,24	5.911,93	1.171.989.400,00	6.025,62	1.189.871.244,00	6.139,31	1.201.331.648,00	6.253,01	1.211.987.680,00	6.366,70	1.227.486.891,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.154.691.667,24		3.206.639.376,52		3.239.932.459,02		3.270.888.802,33		3.315.914.835,12	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	597.769,17	609.724,55	621.679,94	3.154.691.667,24	633.635,32	3.206.639.376,52	645.590,70	3.239.932.459,02	657.546,09	3.270.888.802,33	669.501,47	3.315.914.835,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					102.412.136,59		103.211.824,40		103.724.341,18		104.200.885,97		104.894.020,86	
Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang sadar hukum	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa Kepatuhan (%)	38	5	70	102.412.136,59	72	103.211.824,40	74	103.724.341,18	76	104.200.885,97	78	104.894.020,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					396.923.620,73		399.928.219,09		401.853.854,36		403.644.335,21		406.248.591,41	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	45,6	17,04	47,42	396.923.620,73	48,34	399.928.219,09	49,25	401.853.854,36	50,16	403.644.335,21	51,7	406.248.591,41	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					10.430.731.403,56		10.589.880.207,01		10.691.878.048,56		10.786.716.974,51		10.924.660.289,39	



Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

4.2. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Teknik merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan rencana akhir Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
Rencana Akhir Renstra Beserta Indikator Dinas Perikanan Kabupaten

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan							
Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan				Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Jumlah produksi perikanan (Ton)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terlaksannnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Cakupan binaan kelompok nelayan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembudidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang sadar hukum		3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Perikanan	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01.0010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dan Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Peningkatan Jumlah Unit Usaha Yang dibina serta Peningkatan Kualitas Produk	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Peningkatan Jumlah Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Persentase Pelaksanaan layanan administrasi umum		3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Berdasarkan data pada tabel di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

4.3. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perikanan Kabupaten Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.430.731.403,56		10.589.880.207,01		10.691.878.048,56		10.786.716.974,51		10.924.660.289,39		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.604.714.579,00		5.690.229.543,00		5.745.035.746,00		5.795.995.271,00		5.870.115.951,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	79,65	81,25	5.604.714.579,00	82,06	5.690.229.543,00	82,88	5.745.035.746,00	83,71	5.795.995.271,00	84,55	5.870.115.951,00	3.25.0.00.0.00.01 0000 - Dinas Perikanan	
3.25.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.409.900,00		150.000.000,00		125.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	101.409.900,00	2	150.000.000,00	2	125.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3		3		3		3		3			
3.25.012.010001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
3.25.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3	30.000.000,00	3	50.000.000,00	3	35.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
3.25.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31409.900,00		50.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	1	31409.900,00	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.25.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.073.063.491,67		4.395.402.811,37		4.547.008.906,10		4.622.034.492,98		4.699.956.714,42		
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	32	4.073.063.491,67	32	4.395.402.811,37	32	4.547.008.906,10	32	4.622.034.492,98	32	4.699.956.714,42		
3.25.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.073.063.491,67		4.395.402.811,37		4.547.008.906,10		4.622.034.492,98		4.699.956.714,42		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	32	4.073.063.491,67	32	4.395.402.811,37	32	4.547.008.906,10	32	4.622.034.492,98	32	4.699.956.714,42		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				341.189.250,00		399.115.700,00		330.148.000,00		380.967.700,00		377.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	3	341.189.250,00	3	399.115.700,00	3	330.148.000,00	3	380.967.700,00	3	377.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
3.25.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.895.930,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10	9.895.930,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
3.25.012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		50.148.000,00		50.148.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	10	45.000.000,00	10	50.148.000,00	10	50.148.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00		
3.25.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53.683.000,00		53.967.700,00		45.000.000,00		53.967.700,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50	50	53.683.000,00	50	53.967.700,00	50	45.000.000,00	50	53.967.700,00	50	50.000.000,00		
3.25.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32.610.320,00		35.000.000,00		25.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	3	32.610.320,00	3	35.000.000,00	3	25.000.000,00	3	22.000.000,00	3	22.000.000,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.25.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	1	400.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	1	400.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				599.564.277,33		612.755.979,63		607.878.839,90		607.993.078,02		608.159.236,58		
Persentase Pelaksanaan layanan administrasi umum				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	599.564.277,33	1	612.755.979,63	1	607.878.839,90	1	607.993.078,02	1	608.159.236,58		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1				1				1			
3.25.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.25.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				574.564.277,33		572.755.979,63		572.878.839,90		572.993.078,02		573.159.236,58		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	574.564.277,33	1	572.755.979,63	1	572.878.839,90	1	572.993.078,02	1	573.159.236,58		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.487.660,00		132.955.052,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	0	89.487.660,00	1	132.955.052,00	0	85.000.000,00	0	85.000.000,00	0	85.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
3.25.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.157.660,00		68.684.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	77.157.660,00	20	68.684.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00		
3.25.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.330.000,00		14.271.052,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	12.330.000,00	20	14.271.052,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00		
3.25.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.171.989.400,00		1.189.871.244,00		1.201.331.648,00		1.211.987.680,00		1.227.486.891,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5.684,55	5.911,93	1.171.989.400,00	6.025,62	1.189.871.244,00	6.139,31	1.201.331.648,00	6.253,01	1.211.987.680,00	6.366,70	1.227.486.891,00	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perikanan	
3.25.03.2.01- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				505.000.000,00		514.000.000,00		522.000.000,00		526.500.000,00		532.000.000,00		
Terlaksannya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3	1	505.000.000,00	1	514.000.000,00	1	522.000.000,00	1	526.500.000,00	1	532.000.000,00		
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	999	25		25		25		25		25			
3.25.03.2.010001- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				25.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	32.000.000,00		
3.25.03.2.010002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				230.000.000,00		233.000.000,00		235.000.000,00		236.500.000,00		240.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3	1	230.000.000,00	1	233.000.000,00	1	235.000.000,00	1	236.500.000,00	1	240.000.000,00		
3.25.03.2.010004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				250.000.000,00		253.000.000,00		257.000.000,00		258.500.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	999	25	250.000.000,00	25	253.000.000,00	25	257.000.000,00	25	258.500.000,00	25	260.000.000,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				666.989.400,00		675.871.244,00		679.331.648,00		685.487.680,00		695.486.891,00		
Terlaksananya Cakupan binaan kelompok Nelayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	30	666.989.400,00	30	675.871.244,00	30	679.331.648,00	30	685.487.680,00	30	695.486.891,00		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	20				20				20			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	10	10				10				10			
3.25.03.2.02.0001- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				52.627.287,00		55.667.374,00		55.693.066,00		57.216.953,00		62.751.698,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30	20	52.627.287,00	20	55.667.374,00	20	55.693.066,00	20	57.216.953,00	20	62.751.698,00		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	10	10	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	55.000.000,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				569.362.113,00		570.203.870,00		573.638.582,00		576.770.727,00		577.735.193,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	30	569.362.113,00	30	570.203.870,00	30	573.638.582,00	30	576.770.727,00	30	577.735.193,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				3.154.691.667,24		3.206.639.376,52		3.239.932.459,02		3.270.888.802,33		3.315.914.835,12		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	597.769,17	621.679,94	3.154.691.667,24	633.635,32	3.206.639.376,52	645.590,70	3.239.932.459,02	657.546,09	3.270.888.802,33	669.501,47	3.315.914.835,12	3.250.000.000,01 0000 - Dinas Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1.013.970.016,24		543.886.959,52		493.961.594,02		494.030.989,33		494.131.926,12		
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembudidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	7	1.013.970.016,24	5	543.886.959,52	5	493.961.594,02	5	494.030.989,33	5	494.131.926,12		
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	27	19		15		15		15		15			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10		6		6		6		6			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				241.138.730,00		241.138.730,00		241.138.730,00		241.138.730,00		241.138.730,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10	241.138.730,00	6	241.138.730,00	6	241.138.730,00	6	241.138.730,00	6	241.138.730,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				54.999.365,24		54.999.364,52		54.999.365,02		54.999.365,33		54.999.365,12		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	27	19	54.999.365,24	15	54.999.364,52	15	54.999.365,02	15	54.999.365,33	15	54.999.365,12		
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				10.199.510,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5	5	10.199.510,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				707.632.411,00		207.748.865,00		157.823.499,00		157.892.894,00		157.993.831,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10	7	707.632.411,00	5	207.748.865,00	5	157.823.499,00	5	157.892.894,00	5	157.993.831,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.140.721.651,00		2.662.752.417,00		2.745.970.865,00		2.776.857.813,00		2.821.782.909,00		
Meningkatnya Pengelo laan Pembudidayaan Ikan Kecil	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	2.140.721.651,00	3	2.662.752.417,00	3	2.745.970.865,00	3	2.776.857.813,00	3	2.821.782.909,00		
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	24	8		8		8		8		8			
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	4	2		3		3		3		3			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.038.985,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		86.400.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	40.038.985,00	1	60.000.000,00	1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	86.400.000,00		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.187.484.666,00		1.502.752.417,00		1.573.970.865,00		1.590.457.813,00		1.635.382.909,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	4	2	1.187.484.666,00	3	1.502.752.417,00	3	1.573.970.865,00	3	1.590.457.813,00	3	1.635.382.909,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				53.816.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	1	53.816.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				53.392.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	53.392.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				805.990.000,00		880.000.000,00		880.000.000,00		880.000.000,00		880.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	24	8	805.990.000,00	8	880.000.000,00	8	880.000.000,00	8	880.000.000,00	8	880.000.000,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				102.412.136,59		103.211.824,40		103.724.341,18		104.200.885,97		104.894.020,86					
Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang sadar hukum	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa Kepatuhan (%)	38	70	102.412.136,59	72	103.211.824,40	74	103.724.341,18	76	104.200.885,97	78	104.894.020,86	3.25.0.00.0.00.01. 0000 - Dinas Perikanan				
3.25.05.2.01- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				102.412.136,59		103.211.824,40		103.724.341,18		104.200.885,97		104.894.020,86					
meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	104	107	102.412.136,59	107	103.211.824,40	107	103.724.341,18	107	104.200.885,97	107	104.894.020,86					
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0				2				2			2			
	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	0	0				2				2			2			
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	43	271				271				271			271			
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	107				107				107			107			
	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	0	0				0				0			0		1	



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05.2.010004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				42.470.712,00		42.470.713,00		42.470.713,00		42.470.712,00		42.470.712,00		
Terawasnya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	104	107	42.470.712,00	107	42.470.713,00	107	42.470.713,00	107	42.470.712,00	107	42.470.712,00		
3.25.05.2.010006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				17.470.713,00		17.470.713,00		17.470.713,00		17.470.713,00		17.470.713,00		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	107	17.470.713,00	107	17.470.713,00	107	17.470.713,00	107	17.470.713,00	107	17.470.713,00		
3.25.05.2.010007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				42.470.711,59		42.470.711,40		42.470.711,18		42.470.711,97		42.470.711,86		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	43	271	42.470.711,59	271	42.470.711,40	271	42.470.711,18	271	42.470.711,97	271	42.470.711,86		
3.25.05.2.010009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				0,00		399.844,00		399.844,00		399.844,00		399.844,00		
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0	0,00	2	399.844,00	2	399.844,00	2	399.844,00	2	399.844,00		
3.25.05.2.010010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota				0,00		399.843,00		912.360,00		1.388.905,00		1.388.905,00		
Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	0	0	0,00	2	399.843,00	2	912.360,00	2	1.388.905,00	2	1.388.905,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05.2.010012 - Pengawasan Ekstraksi Garam				0,00		0,00		0,00		0,00		693.135,00		
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	693.135,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				396.923.620,73		399.928.219,09		401.853.854,36		403.644.335,21		406.248.591,41		
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	45,6	47,42	396.923.620,73	48,34	399.928.219,09	49,25	401.853.854,36	50,16	403.644.335,21	51,7	406.248.591,41	3.25.00.000.01.0000 - Dinas Perikanan	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				84.916.643,00		82.201.943,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dan Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	0	1	84.916.643,00	1	82.201.943,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	0	3		3		3		3		3			
3.25.06.2.010003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				35.267.643,00		47.201.943,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	0	3	35.267.643,00	3	47.201.943,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
3.25.06.2.010005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				49.649.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	0	1	49.649.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				86.600.140,00		77.726.276,00		91.853.854,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Peningkatan Jumlah Unit Usaha Yang dibina serta Peningkatan Kualitas Produk	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	10	86.600.140,00	10	77.726.276,00	10	91.853.854,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				86.600.140,00		77.726.276,00		91.853.854,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	5	10	86.600.140,00	10	77.726.276,00	10	91.853.854,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				225.406.837,73		240.000.000,09		225.000.000,36		233.644.335,21		236.248.591,41		
Peningkatan Jumlah Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	9	4	225.406.837,73	4	240.000.000,09	4	225.000.000,36	4	233.644.335,21	4	236.248.591,41		
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	134,12	13,41		20,12		26,82		33,53		40,24			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.406.838,00		165.000.000,00		160.000.000,00		163.644.335,00		164.248.591,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	134,12	13,41	150.406.838,00	20,12	165.000.000,00	26,82	160.000.000,00	33,53	163.644.335,00	40,24	164.248.591,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				74.999.999,73		75.000.000,09		65.000.000,36		70.000.000,21		72.000.000,41		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	9	4	74.999.999,73	4	75.000.000,09	4	65.000.000,36	4	70.000.000,21	4	72.000.000,41		

Mengacu pada program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.



4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut ini disajikan daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



4.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dapat diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang mengacu pada RPJMD. Sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian Visi Misi Bupati. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menjadi ladang sektor dalam pencapaian misi II pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 yaitu : “Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal”, salah satu tujuannya adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang akseleratif melalui pengelolaan potensi dan sumber daya lokal”. Salah satu sasaran yang akan di capai dari tujuan tersebut yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan adalah “Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan” dengan indikator kinerja sasaran. “Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan”.



4.5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tercermin melalui indikator Kinerja Utama (IKU), dimana indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut disajikan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Nunuka tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan									
2.	Jumlah produksi perikanan	Ton	603.453,72	615.522,79	627.591,87	639.660,94	651.730,01	663.799,10	675.868,17	
3.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A	A	

Formula Perhitungan

Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formula Perhitungan	Definisi Operasional	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	$\text{Jumlah Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya}$	Jumlah Produksi Perikanan adalah Hasil Produksi dari Perikanan Tangkap dan Produksi dari Perikanan Budidaya dalam Satuan Ton	- Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya - Bidang Pengawasan Usaha Perikanan - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Data Statistik Perikanan - Badan Pusat Statistik (BPS) - Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya - Bidang Pengawasan dan Izin Usaha Perikanan - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut tabel indikator kinerja kunci beserta target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pembangunan daerah di bidang perikanan tahun 2025 sampai 2030 :



Tabel 4.6
Indiaktor Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	597.769,17	609.724,55	621.679,94	633.635,32	645.590,70	657.546,09	669.501,47	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	5.684,55	5.798,24	5.911,93	6.025,62	6.139,31	6.253,01	6.366,70	



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Perikanan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 merupakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan;



2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.



Selanjutnya RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Perikanan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Nunukan,**



SUIADI, S.Hut, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19681105 199403 1 007